BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Politik sebagai suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat untuk pembuatan keputusan dalam suatu negara. Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi modal awal terbentuknya sistem politik. Kemudian membentuk pemerintahan yang sah dan menjalankan roda kepemimpinan dalam sebuah sistem kenegaraan. Hal ini ditandai dengan berbagai istilah di masa-masa kepemimpinan yang berbeda. Pada awal kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya, ditandai dengan berbagai perubahan yang dibuat. Pembentukan sifat politik ini menghadirkan era kepemimpinan politik yang berbeda dari masa kemerdekaan hingga reformasi.

Pemerintah sebagai organisasi yang berwenang untuk membuat kebijakan dan mengatur segala urusan dalam suatu negara. Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntunan dan tanggungjawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu diselenggarakan secara dinamis, dan tepat sasaran guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mewujuddkan hal tersebut maka dibuatlah UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan tujuan semua daerah dapat mandiri dalam berbagai bidang termasuk dalam segi politik.

Pemerintah mempunyai fungsi dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan, fungsi tersebut harus dapat dilaksanakan dengan baik. Fungsi pelayanan pemerintah dalam hal ini komisi pemilihan umum (KPU) diharapkan

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam semua hal yang berhubungan dengan pemilihan umum. Selain itu Dinas sosial diharapkan dapat membina dan memberdayakan masyarakat menjadi mandiri sehingga tidak ketergantungan kepada orang lain. Dinas Bina Marga diharapkan dapat menyediakan fasilitas umum yang layak dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Kota Bandung sebagai salah satu kota yang mempunyai peranan cukup penting dalam perkembangan politik di Indonesia. Salah satu bentuk partisipasi Kota Bandung untuk mempertahankan kesatuan Indonesia yaitu pada tahun 1945 masyarakat Bandung menolak berdirinya Negara pasundan dan lebih memilih bersatu menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibawah kepemimpinan Ir.Soekarno dan M.Hatta. Selain itu Kota Bandung juga menjadi tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika (KAA).

Dilihat dari sejarah masyarakat Kota Bandung selalu berpartisipasi dalam perkembangan politik. Namun sangat disayangkan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat pada tanggal 24 Pebruari 2013 lalu, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya Masih adanya masyarakat yang tidak memilih tentu menjadi masalah, masalah yang ada bisa dari tingkat elektabilitas partai yang menurun sehingga berpengaruh terhadap calon gubernur maupun fasilitas yang kurang memadai bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pilgub.

Masyarakat sangat beragam salah satunya masyarakat penyandang disabilitas (penyandang cacat). Khususnya penyandang cacat fisik yang mempunyai potensi untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Semua

masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi politik guna menyampaikan pendapat demi kemajuan suatu bangsa.

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan seperti: memberikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan dan menjadi anggota partai politik.

Selain masyarakat normal, penyandang disabilitas tentunya memiliki potensi untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi dalam dunia politik. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan mental maupun fisik. Kondisi disabilitas dapat terjadi karena kondisi sejak lahir ataupun terjadi akibat suatu kecelakaan yang dapat menyebabkan seseorang/ masyarakat menjadi penyandang disabilitas.

Masalah yang dihadapi penyandang disabilitas terutama penyandang cacat fisik diantaranya fasilitas yang belum tersedia, seperti trotoar, tempat penyebrangan, tempat duduk khusus dalam transportasi umum, dll. Selain itu fasilitas dalam pemilihan umum seperti, surat suara braile bagi penyandang tuna netra , bilik suara yang cukup untuk kursi roda bagi penyandang tuna daksa, Pengenalan calon gubernur secara khusus bagi penyandang cacat fisik yang belum disediakan oleh pemerintah bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, jumlah penyandang disabilitas di tahun 2009 tercatat sebanyak 154.967 jiwa. Sementara

data yang dilansir dari organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) mengatakan, jumlah 10 persen penduduk setiap daerah adalah penyandang disabilitas. Artinya di Provinsi Jawa Barat yang kini penduduknya sudah mencapai 44 juta jiwa, 4,4 juta orang adalah penyandang disabilitas.

Bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas dapat berupa memberikan suara pada pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah dan dapat menjadi anggota suatu partai politik.

Salah satu masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemilihan gubernur (pilgub) telah dimuat dalam sebuah artikel kmpas.com yang berjudul "Akses Penyandang Disabilitas di Pilgub Jabar Belum Maksimal". Dalam artikel tersebut disampaikan bahwa dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2013 belum sepenuhnya berpihak terhadap penyandang dsabilitas.

Salah satu fenomena yang terjadi yaitu kurangnya sosialisasi calon gubernur bagi penyandang disabilitas. Penyandang tuna netra kesulitan untuk memilih calon gubernur, begitu pula dengan tuna rungu, pemerintah tidak memfasilitasi media sosialisasi cagub dan cawagub bagi tuna rungu. Selain itu penyandang tuna daksa juga kesulitan karena bilik suara tidak muat untuk kursi roda. Sosialisasi Calon gubernur dan wakil gubernur belum dapat dipahami oleh penyandang disabilitas. Dalam proses mengenali calon pasangan gubernur dan wakil gubernurpun penyandang disabilitas fisik yaitu tuna netra, tuna rungu/tuna wicara dan tun daksa merasa kesulita.

Khususnya bagi penyandang tuna netra dan tuna rungu/tuna wicara karena media sosialisasi seperti baligho, spanduk dan poster tidak dapat dipahami oleh penyandang tuna netra dan tuna rungu. Sehingga penyandang dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur, penyandnag tidak sedikit penyandang disabilitas yang tidak mengenali pasangan yang akan dipilih, padahal hak-hak penyandang cacat telah dijamin oleh dunia internasional.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa pemerintah khusunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat belum sepenuhnya memfasilitasi penyandang disabilitas khusunya penyandang cacat fisik untuk dapat memberikan hak suaranya. Padahal hak politik bagi penyandang disabilitas telah dijamin bahkan oleh dunia internasional. Tetapi fasilitas dan akses bagi penyandang disabilitas untuk dapat memberikan suara belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga tidak sedikit penyandang disabilitas yang tidak memberikan hak suaranya.

Selain itu fenomena yang terjadi yaitu para penyandang disabilitas di Kota Bandung tidak ada yang menjadi kader partai politik. Sebagian besar partai politik di Kota Bandung tidak ada kader yang merupakan penyandang disabilitas. Sehingga salah satu sarana bagi penyandang disabilitas untuk untuk mendapatkan hak dalam berpartisipasi politik tidak dapat terpenuhi.

Partai politik koalisi pilgub Jabar 2013 yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai tersebut tingkat Kota yaitu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Bandung tidak terdapat penyandang disabilitas dalam tubuh partai. Dalam partai politik tersebut tidak terdapat kadernya yang penyandang disabilitas. Tidak adanya penyandang disabilitas yang menjadi kader partai politik merupakan suatu masalah karena menjadi kader partai politik merupakan salah satu cara penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi politik di Kota Bandung.

Dampak dari kurangnya partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Bandung adalah penyandang disabilitas merasa tidak mendapatkan haknya terlibat dalam dunia politik , karena kemungkinan penyandang disabilitas dianggap tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Sehingga dalam hal ini perlu diberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas agar mampu menyalurkan aspirasinya melalui partisipasi politik, Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **"Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kota Bandung".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memperjelas fokus masalah yang akan ditulis dalam penelitian ini. Peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam berpartisipasi politik di Kota Bandung Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian suara penyandang disabilitas dalam pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2013 di Kota Bandung ?
2. Untuk mengetahui keikutsertaan penyandang disabilitas dalam rapat umum di Kota Bandung ?
3. Untuk mengetahui hubungan penyandang disabilitas dengan pejabat pemerintah di Kota Bandung ?
4. Untuk mengetahui keterlibatan penyandang disabilitas dalam partai politik di Kota Bandung ?

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi kepentingan peneliti, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengalaman, wawasan dan memahami Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Bandung, sehingga mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian fakta dilapangan dengan teori yang ada.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan yang relevan diantaranya teoripartisipasi politik.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan.
3. Secara praktis, diharapkan penelitian ini sebagai masukan untuk Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan kesempatan bagi penyandang disabiltas untuk dapat berpartisipasi dalam dunia politik, di Kota Bandung.